

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Alasan saya mengambil judul Tantangan, Hambatan dan peluang Indonesia Dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 dikarenakan beberapa alasan diantaranya adalah :

Pertama, penulis menganggap bahwa judul atau kajian ini sangat menarik untuk dipelajari guna mengetahui keadaan, perkembangan dan kesiapan negara-negara anggota ASEAN karena dewasa ini cenderung menjadi isu yang hangat di kawasan Asia Tenggara. Isu adanya integrasi ini diduga ada kaitannya dengan meniru Uni Eropa.

Kedua, di dalam memuluskan keinginan ASEAN memang tidak gampang, adanya berbagai persoalan juga menghambat proses tersebut. Baik itu secara internal maupun secara eksternal sendiri. Tingginya kompetisi regional, khususnya semakin menjulangnya perekonomian China dan India juga merupakan salah satu faktor yang menghambat dan justru membuat ASEAN mempercepat integrasi ekonomi ASEAN. Hal ini sangat menarik untuk dipelajari lebih mendalam.

Ketiga, tantangan seperti iklim investasi juga sangat menentukan baik atau tidaknya proses integrasi itu. Kita ketahui bahwa hanya Singapura yang siap untuk menghadapi hal ini. Sedangkan negara-negara lain, khususnya Indonesia pasca krisis ekonomi, posisi tawarnya sangat rendah. Dari sini penulis berinisiatif untuk

mengetahui mengapa negara-negara ASEAN bersikeras untuk mempercepat integrasi yang semula 2020 menjadi 2015 khususnya Indonesia.

Keempat, penulis juga ingin melihat peluang dan posisi Indonesia karena sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia adalah salah satu pendiri ASEAN yang sempat menyangang gelar “Macan Asia” kini masih bisa mengaung atau tidak tentunya penulis akan lebih mendiskripsikannya di bab berikut.

B. Tujuan Penulisan

- a. Mengemukakan dan menjelaskan kebijakan luar negeri Indonesia dalam menghadapi percepatan integrasi ASEAN 2015.
- b. Mendeskripsikan implikasi pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN terhadap kebijakan ekonomi anggota dan posisi Indonesia
- c. Untuk melengkapi mata kuliah skripsi yang akan dijadikan syarat untuk memperoleh gelar strata 1 (S1) pada jurusan Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

C. Latar Belakang Masalah

Tidak dapat dipungkiri, ASEAN (*Association of Southeast Asian Nation*) telah menjadi bagian dari sistem internasional. Banyak hal seperti tantangan, hambatan dan harapan dalam perjalanan organisasi kawasan ini menjadi satu problema yang mengerucut sehingga adanya keinginan untuk berintegrasi.

ASEAN sendiri terbentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, yang ditandatangani oleh lima menteri luar negeri dari lima negara yaitu Adam Malik dari Indonesia, Narciso R. Ramos dari Filipina, Tun Abdul Razak dari Malaysia, S Rajaratman dari Singapura, dan Thanat Khoman dari Thailand. Dengan ditandatanganinya ASEAN *Declaration* atau lebih dikenal dengan sebutan Bangkok *Declaration* maka resmilah ASEAN terbentuk.

Lima negara yang menandatangani dokumen tersebut kita mengenalnya dengan sebutan *the founding fathers*. Kelima negara itu yaitu Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Sedangkan lima negara lainnya bergabung secara tidak bersamaan dimulai dari Brunei Darussalam pada tanggal 8 Januari 1984, Vietnam pada 28 Juli 1995, Laos dan Myanmar pada 23 Juli 1997, dan Kamboja pada 30 April 1999.

Sebenarnya ASEAN adalah organisasi regional tertutup karena keanggotaannya hanya terdiri dari negara-negara Asia Tenggara.¹ Pendirian ASEAN dilatarbelakangi oleh ketidakstabilan ekonomi dan persamaan nasib negara-negara Asia Tenggara yang hampir semuanya mengalami penjajahan (kecuali Thailand). Pendirian ASEAN memiliki tujuan yang mulia yakni sebagai badan kerjasama dibidang ekonomi, politik, sosial budaya untuk menciptakan stabilitas dan kedamaian di kawasan Asia Tenggara berdasarkan piagam PBB.

¹ Sumaryo suryokusumo, (1993), "Aspek Hukum Internasional dan Regional ASEAN sehubungan dengan AFTA", *jurnal Luar Negeri*, No. 24 Hal. 38

Dalam dokumen “Deklarasi Bangkok” yang hanya terdiri dari lima artikel yang menyatakan tujuan terbentuknya organisasi regional tersebut.² Karena itu, dokumen itu tidak dapat menjadikan ASEAN sebagai formal *association* yang diterima sistem internasional. Alasannya adalah bahwa dokumen itu bukanlah bentuk perjanjian yang mengikat, dalam artian tidak adanya ratifikasi sebagaimana bentuk perjanjian internasional lazimnya.

ASEAN *Way* adalah cara ASEAN mengatasi berbagai masalah baik internal maupun eksternal organisasi melalui *consultation and consensus*. Ini telah diatur dalam sebuah perjanjian yang dapat mengikat para anggotanya yaitu *Treaty of Amity and Cooperation* (TAC). Perlu diketahui ini didapat hampir sembilan tahun setelah terbentuknya ASEAN.

Adapun prinsip yang sama antara ASEAN *Way* dengan TAC yaitu Menghormati kedaulatan setiap negara anggota, prinsip *non-interference*, penyelesaian masalah dengan cara damai, dan tidak menggunakan cara-cara yang mengandung unsur pemaksaan.³

Dalam mengaplikasikan prinsip ini sangat sulit bagi ASEAN untuk melakukan kerjasama dengan unsur-unsur yang dapat memaksa negara anggotanya. Hal ini menyebabkan ASEAN tidak mampu berbuat banyak untuk menghadapi konflik internal ASEAN karena terhalang oleh prinsip *non-interference*.

² Frans Bona Sihombing, 1986 “Ilmu Politik Internasional “Jakarta : Gahlia Indonesia

³ Gillian Goh, “*Non-Intervention and ASEAN’s Role in Konflik Managment*”, www.stanford.edu diakses pada 2 Agustus 2008 pukul 01.24 WIB.

Pada awal terciptanya, ASEAN Way berhasil menciptakan perdamaian dan stabilitas yang mengarah pada penguatan kerjasama ekonomi dan integrasi negara anggotanya. Sebagai contoh, dengan ASEAN Way, ASEAN mendorong terciptanya *Zone of peace, Freedom and Neutrality (ZOPFAN)*, *ASEAN Regional Forum (ARF)*, dan ASEAN +3.⁴

Konflik Myanmar adalah salah satu contoh lemahnya prinsip ASEAN Way. Konflik yang telah terjadi bertahun-tahun ini telah menjadi pemasalahan bagi stabilitas ASEAN sejak lama. Pemimpin Junta Militer Myanmar menggunakan prinsip *non-interference* sebagai alasan agar permasalahan internal negaranya tidak dicampuri ASEAN. Ketidakmampuan ASEAN ini menjadi sorotan dunia internasional yang mempertanyakan tanggungjawab ASEAN terhadap masyarakat Myanmar.

Selain itu salah satu kelemahan ASEAN lainnya adalah minimnya kerangka hukum formal mengikat negara-negara anggota. Sejauh ini ASEAN hanya memiliki dua perjanjian yaitu TAC dan *Treaty on Southeast Nuclear Weapons-Free Zone (SEANWFZ)*. Persetujuan-persetujuan lain yang dilakukan oleh negara-negara anggotanya hanya berupa persetujuan-persetujuan lepas yang tidak diikat oleh satu dasar hukum apapun.

Kini sebuah perjalanan panjang yang telah ditempuh atas kerjasama regional ASEAN telah menemukan bentuk yang lebih riil lagi. Sepuluh negara ASEAN berusaha dalam membentuk identitas tunggal kawasan, meskipun

⁴ Ali Alatas, (2007) “*The ASEAN Charter* “. *The Indonesian Quarterly*, Vol. 35, No. 1, Hal. 4

perbedaan budaya masing-masing anggota masih membayangi perjalanan ini. Akan tetapi dengan ditandatanganinya piagam ASEAN dan *blue print* ASEAN menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 pada KTT ASEAN ke-13 di Singapura tahun 2007 silam yang juga bertepatan dengan ulang tahunnya ke-40.

Dengan kata lain, ASEAN telah melalui proses transformasi, yang dulunya hanya sebatas kumpulan negara yang berbicara tentang politik guna mencapai kedamaian dan keamanan di Asia Tenggara kini berhaluan menuju kearah komunitas kawasan yang lebih terintergrasi. Cita-cita integrasi ASEAN kini lebih jelas setelah para kepala negara menetapkan komunitas ASEAN (*ASEAN Community*) yang tercantum dalam Bali *Concord II* yang didasarkan atas tiga pilar, yaitu Komunitas Keamanan ASEAN (ASC), Komunitas Ekonomi ASEAN (MEA/AEC) dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN (ASCC). Namun dalam perjalannya, MEA adalah tujuan akhir dari keinginan berintegrasi di Asia Tenggara.

Piagam ASEAN atau yang kita kenal sebagai *ASEAN Charter* adalah payung hukum yang diharapkan untuk menghadapi arus globalisasi. Selain itu, piagam ini juga mengharapakan ASEAN semakin kokoh dan solid dalam menghadapi berbagai perubahan di dunia internasional.

Perumusan *ASEAN Charter* didahului dengan pembentukan *Eminent Person Group* (EPG) yang berfungsi sebagai perumus *ASEAN Charter* yang

akan menjadi landasan hukum organisasi regional ini.⁵ Dengan *ASEAN Charter* ini diyakini organisasi ini menjadi sebuah komunitas Asia Tenggara yang dicita-citakan dengan pembentukan komunitas keamanan, ekonomi, dan sosial budaya 2015.

Perumusan *ASEAN Charter* tidak luput dari hambatan-hambatan yang mengakibatkan lambatnya perumusannya. Untuk merealisasikan *ASEAN Charter*, dimulai dari munculnya ide lebih mengintegrasikan negara-negara anggota ASEAN sampai munculnya ide perumusan *ASEAN Charter* saja diperlukan waktu dua tahun terhitung dari tahun 2003 sampai 2005, serta proses perumusan tersebut pun memakan waktu dua tahun yakni dari 2005 sampai akhir 2007.

Akan tetapi, proses perumusan legal hukum bagi organisasi regional ini mendapatkan dukungan dari organisasi lainnya, seperti Uni Eropa yang memberikan contoh bagi ASEAN untuk menjadi lebih terintegrasi lagi dibanding sebelumnya dengan sebuah *Charter* yang menjadi konstitusi bagi Masyarakat.

Dalam *ASEAN Charter*, salah satunya berisikan tentang integrasi ekonomi. Pada umumnya dimaksudkan untuk mengurangi atau menghilangkan berbagai hambatan perdagangan dan kegiatan ekonomi lainnya. Diantara negara-negara yang tergabung dalam suatu ikatan kerjasama. Untuk mengintegrasikan ekonomi dalam rangka menciptakan sebuah area ekonomi yang kuat dibutuhkan

⁵ “*ASEAN seharusnya dirikan pengadilan*” www.indonesia-sinegal.go.id diakses pada 2 September 2008, pukul 10.57 WIB

komitmen yang lebih besar dari negara anggota dalam rangka menciptakan sebuah area ekonomi yang kuat.

Kita dahulu mengenal AFTA (*ASEAN Free Trade Area*), sebuah konsep semangat untuk membentuk kawasan perdagangan bebas. AFTA merupakan suatu kawasan dimana tarif dan kuota antara negara anggota dihapuskan, namun masing-masing negara masih menerapkan tarif mereka masing-masing terhadap negara bukan anggota. Sebenarnya AFTA sendiri telah dimulai sejak dicapai kesepakatan ditahun 1992 oleh negara-negara anggota ASEAN. Namun pengimplementasiannya baru terlaksana medio Januari 2003. Salah satu faktor pendukung dari pembentukan kawasan perdagangan bebas ASEAN juga didasari oleh prinsip ASEAN, yaitu sebagai salah satu institusi regional yang telah mampu memperlihatkan kekompakan menciptakan keamanan regional merupakan salah satu prasyarat utama dalam menciptakan stabilitas kerjasama ekonomi bagi negara anggota AFTA.

Pembentukan AFTA sendiri merupakan langkah awal dalam rangka mendukung proses terciptanya integrasi ekonomi ASEAN yang disebut sebagai Masyarakat Ekonomi ASEAN. Konsep utama mekanisme kerja dari AFTA adalah:

1. Penurunan hambatan tarif perdagangan untuk sejumlah produk bagi negara anggota ASEAN.
2. Liberalisasi dalam semua bidang termasuk menghilangkan segala hambatan non tarif.

3. Penurunan Hambatan untuk akses pasar disektor jasa bagi negara anggota ASEAN.

Pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN juga merupakan salah satu pilar pendukung pondasi terciptanya ekonomi ASEAN 2015. salah satu alasan logis terbentuknya komunitas ekonomi ini, disebabkan oleh keadaan yang selama ini menggambarkan kelemahan institusi ASEAN. Institusi ini tidak cukup memiliki kewenangan atau otoritas dalam menentukan berbagai masalah kebijakan ekonomi yang justru sangat diperlukan saat ini. Hambatan yang dihadapi oleh ASEAN sendiri juga datang dari kelemahan koordinasi lintas sektoral antar negara anggota, karena tidak adanya mekanisme serta masing-masing pihak merasa yang paling berwenang untuk menentukan sehingga terjadi ego sektoralnya. Jadi bisa kita katakan bahwa pemikiran akan pentingnya menjalin kerjasama yang lebih erat lagi dalam proses integrasi merupakan salah satu upaya merespon tantangan di era globalisasi. Karena dengan kerjasama yang solid dan intens dibidang ekonomi maka ASEAN akan mampu memegang kendali kawasan, bukan menjadi marjinal di kawasannya sendiri dan Asia pada umumnya.

Melihat kondisi ini, sepertinya Tantangan justru datang menghampiri Indonesia. Persaingan ekonomi antar negara anggota ASEAN juga membuat Indonesia seharusnya waspada. Betapa tidak, Singapura telah menunjukkan kesiapannya untuk melakukan integrasi ini dengan memperbaiki iklim investasinya. Sebenarnya wacana perbaikan iklim investasi sudah menjadi “lagu lama” yang sering diagendakan pemerintah Indonesia. Nyatanya, *jobless growth* masih menghantui

bangsa ini. Kesalahan pemerintah adalah tidak mengantisipasi dampak globalisasi dimana industri padat karya hijrah ke negara yang lebih menjanjikan, selain itu kita masih saja tertinggal dalam kemajuan teknologi. Keadaan ini yang membuat Indonesia masih terdesak untuk menciptakan lapangan pekerjaan.

Dalam interaksi perdagangan dengan negara ASEAN, Indonesia menunjukkan hasil yang memuaskan selama lima tahun terhitung dari tahun 1996 sampai dengan 2001 rata-rata 7,94% setiap tahunnya. Peningkatan ini menjadi US\$ 4,044.88 juta pada tahun 2001 dimana sebelumnya ditahun 1996 tercatat US\$ 2,760.95 juta. Neraca perdagangan Indonesia di ASEAN tercatat yang paling besar dilakukan ke Singapura disusul Malaysia dan kemudian Philpina yang masing-masing besarnya adalah US\$ 2,216,78 juta, US\$ 773,17 juta, US\$ 720,93 juta.⁶

Jika menilik pada medio 1997, krisis finansial yang melanda Asia Tenggara sangat cepat berubah menjadi krisis ekonomi dan politik di Indonesia. Kurs rupiah merosot tajam dan inflasi tak terkendali membuat respon pemerintah untuk menaikkan tingkat suku bunga domestik. Pemerintah Indoonesia juga terpaksa untuk meminjam dana pada IMF untuk mengendalikan perekonomian bangsa pada saat itu. hasilnya adalah penumpukkan hutang yang menghantui rakyat Indonesia sampai sekarang.

Pendapatan per kapita Indonesia juga menunjukkan kemajuan pada pemerintahan Orde Baru, dari US\$ 70 menjadi US\$ 1.000 pada medio 1996. pada

⁶ “Perdagangan Indonesia Dengan ASEAN” www.depdag.go.id diakses pada 21 November 2008 pukul 23.30

tahun 2008 GNP per kapita Indonesia sebesar US\$ 1.420, masih jauh tertinggal dari negara Anggota ASEAN lainnya seperti Singapura, Malaysia dan Thailand yang masing-masing US\$ 29.320, US\$ 5.490 dan US\$ 2.990.⁷

Beberapa alasan diatas tampaknya masih meragukan Indonesia dalam mencapai tujuan politik luar negerinya terhadap integrasi ASEAN ini. Pasalnya, kekuatan Indonesia diberbagai sektor terlihat lemah meskipun di sisi lain masih tersimpan sebuah harapan untuk membangunkan “Macan Asia” ini dari tidur panjangnya .

D. Perumusan Masalah

Dari latar belakang diatas maka disusun rumusan permasalahan sebagai berikut:

Mengapa Indonesia menyepakati masyarakat ekonomi ASEAN 2015 ?

E. Kerangka Teoritik

Dalam membahas Tantangan, Hambatan dan Peluang bagi Indonesia Dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Teori yang akan saya gunakan dalam membahas masalah ini adalah *Teori Pembuatan Kebijakan Luar Negeri dan Konsep Integrasi Ekonomi*.

⁷ Koran Tempo 13 Mei 2008 “pendapatan perkapita Indonesia 2007” www.quantan.blogspot.com diakses pada 21 November 2008 pukul 23.30

1. Teori Pembuatan Kebijakan Politik Luar Negeri

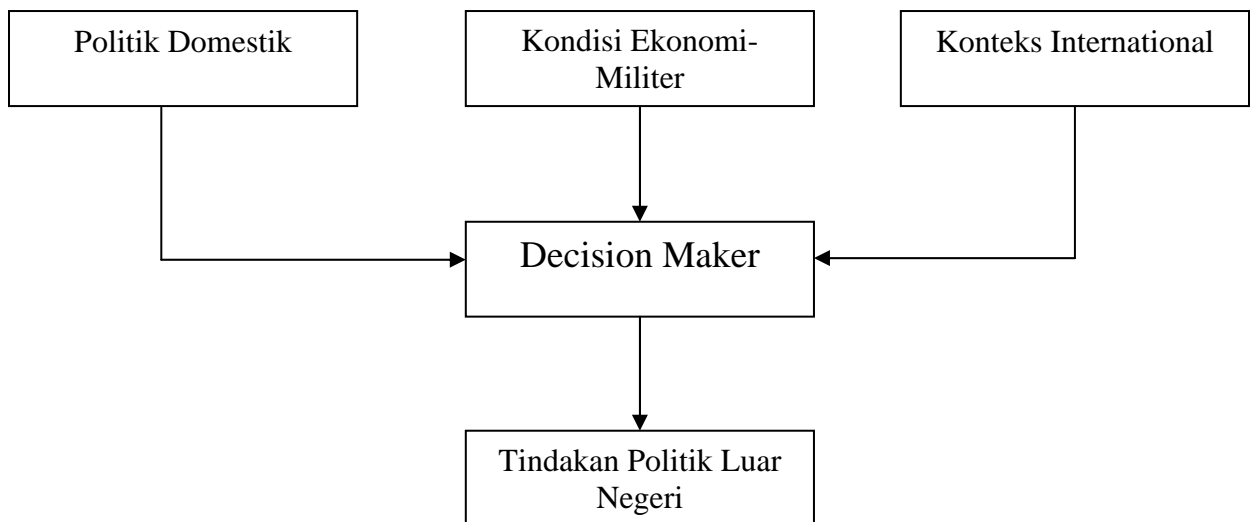
Salah satu teori pengambilan keputusan dan kebijakan politik luar negeri dikemukakan oleh William D. Coplin⁸

Tindakan politik luar negeri suatu negara dipengaruhi oleh empat determinan. Pertama, kondisi politik dalam negeri, Kedua, situasi ekonomi dan militer tersebut termasuk faktor geografis yang selalu menjadi pertimbangan utama dalam pertahanan/keamanan. Ketiga, konteks internasional dan keempat, konteks pengambil keputusan

Ilustrasi dibawah ini akan memperjelaskan gambaran tentang pembuatan keputusan luar negeri:

Gambar 1.1

Proses Pembuatan Keputusan Luar Negeri



Sumber : William D. Coplin, pengantar politik Internasional, Sinar Baru Algensindo, Bandung

⁸ William D Coplin. *Pengantar Politik Internasional*. Sinar Baru Algensindo, Bandung 2003

A. Konteks Politik Dalam Negeri

Hubungan luar negeri suatu kegiatan antar bangsa baik regional maupun global melalui forum bilateral maupun multilateral yang diabadikan pada kepentingan nasional yang senantiasa dilandasi dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif dan diarahkan untuk melindungi kepentingan bangsa. Ini sesuai dengan Alinea IV Pembukaan UUD 1945 yang menggariskan bahwa salah satu tujuan penyelenggaraan hubungan dan politik luar negeri adalah untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, yaitu melindungi kepentingan bangsa dan negara, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut menjaga perdamaian dan ketertiban dunia.

Pengertian bebas aktif mempunyai makna ketegasan bahwa Indonesia dalam menentukan dan menjalankan politik luar negerinya bersikap mandiri. Kemandirian merupakan manifestasi perjuangan menjunjung tinggi kemerdekaan dan kedaulatan bangsa dan Negara, sementara kebebasan dan keaktifan politik luar negeri harus selalu dilandasi oleh jiwa idiologi dan UUD 1945.⁹

A. Konteks Internasional

Banyak tantangan yang datang dari internal dan eksternal ASEAN juga memacu keinginan para negara anggota ASEAN untuk berbenah. Dari internal sendiri tampak adanya persaingan dalam menarik investasi asing. Selain itu iklim investasi yang sangat tidak sehat serta posisi tawar negara anggota ASEAN yang rendah. Secara eksternal, adanya kemajuan perekonomian China dan India juga

⁹ Djumadi.M.Anwar, *Jurnal Politik Luar Negeri Indonesia*, 2004

mengisyaratkan Indonesia untuk merealisasikan keinginan bersama Negara Anggota ASEAN untuk mempercepat integrasi secara ekonomi.

Dukungan para sesama anggota ASEAN juga memberi semangat Indonesia untuk meliberalisasikan perekonomiannya di kawasan Asia Tenggara. Pasalnya setelah empat puluh tahun terbentuk baru sekarang semangat integrasi itu ada dengan adanya piagam ASEAN.

B. Konteks Ekonomi dan Militer

Perekonomian Indonesia yang kembang kempis ditambah dengan nilai tukar rupiah yang fluktuatif menambah keyakinan pemerintah untuk melakukan integrasi. Indonesia juga masih jauh tertinggal dengan negara berkembang lainnya di ASEAN seperti Malaysia dan Thailand meskipun dalam lima tahun ini transaksi perdagangan Indonesia meningkat. Ini diperparah dengan lemahnya sistem pertahanan kita seperti Militer yang juga jauh tertinggal dari Negara-negara Anggota ASEAN lainnya.

Kekuatan militer dalam politik masih tetap dominan, meskipun kepala Negara orang sipil, apalagi jika para militer dipartai-partai politik “bermain mata”, maka militer tetap akan mengendalikan kehidupan politik suatu negara, contohnya Myanmar. Di Indonesia sendiri kudeta juga pernah terjadi di era Soekarno yang terjadi dikarenakan Soekarno berseberangan dengan militer, sehingga Soeharto mengudetanya. Selain itu, masalah batas wilayah dan embargo senjata juga turut memberikan kontribusi atas keinginan Indonesia untuk berintegrasi.

Dengan alasan itulah Indonesia tidak ingin menyia-nyiaikan kesempatan ini untuk terus berbenah didalam lingkaran ASEAN.

C. Konteks Pembuat Keputusan

Dalam sebuah proses pembuatan keputusan luar negeri, para *decision makers* di Indonesia biasanya berusaha untuk membuat kebijakan yang tidak merugikan kepentingan nasional Indonesia. Indonesia yang notabene negara yang sedang berkembang menginginkan negaranya tidak bergantung pada bantuan asing. Menjaga stabilitas ekonomi adalah sebuah keharusan yang diemban pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selaku regulator.

Konsistensi kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas aktif sudah terlihat dari peranan Indonesia dalam membesarkan ASEAN. Berkali juga Indonesia menjadi tuan rumah dan sebagai fasilitator untuk berbagai permasalahan yang terjadi di ASEAN baik secara ekonomi, politik dan lain-lain.

Dari semua itu pemerintah Indonesia segera berbenah menyambut kedatangan Integrasi itu. Dari semua sektor pemerintah Indonesia paling konsentrasi pada ketenagakerjaan. Karena dikhawatirkan ditengah ketatnya persaingan usaha dalam suasana perekonomian yang terintegrasi, arus tenaga kerjalah yang dilihat sangat riskan.

Kalau diteliti lagi, Indonesia adalah negara terbanyak penduduknya di Asia Tenggara jadi, dari sisi jumlah tenaga kerja, sebagian besar berada di Indonesia.

Indonesia bisa saja menawarkan ketersediaan tenaga kerja yang cukup dan pasar yang luas, sehingga bisa menjadi pusat industri untuk kawasan Asia Tenggara.

Selain itu, besarnya pasar produksi yang ada dikawasan ASEAN sendiri membuat kebijakan pemerintah terhadap ekspor juga berbenah. Indonesia memiliki produk yang bisa ditawarkan dikawasan ASEAN dan mempunyai potensi untuk meningkatkan pangsa di ASEAN.

Keyakinan Indonesia akan meraih sukses dengan adanya integrasi tersebut, diyatakan dengan cara meratifikasi ASEAN *Charter* pada tanggal 21 Oktober 2008. ASEAN *Charter* yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut sempat ditolak oleh DPR untuk diratifikasi karena dianggap menyalahi prosedur perjanjian internasional. Didalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, yang mempersyaratkan konsultasi dengan DPR RI oleh Menteri (terkait), dalam pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional, dalam hal ini ASEAN Charter¹⁰. Penolakan ini di luar bayangan dan asumsi para konseptor dan para penandatangan *Charter* ini. Akhirnya, Indonesia mendapat kehormatan dengan menjadi negara terakhir yang meratifikasi *Charter* tersebut.

¹⁰ Nn “Wajah Lama ASEAN Charter” diunduh dari www.syaltout.multiply.com pada tanggal 8 Februari 2009 pukul 20.00 WIB

2. Konsep Integrasi Ekonomi

Sebelumnya penulis akan menjelaskan definisi konsep integrasi, menurut Ernest Haas sebagai berikut:

Proses dengan mana aktor-aktor politik di beberapa wilayah nasional yang berbeda terdorong untuk memindahkan kesetiaan, harapan dan kegiatan politik mereka ke suatu pusat baru yang lembaga-lembaganya memiliki atau menuntut yurisdiksi atas negara-negara nasional yang ada sebelumnya.¹¹

Suatu gagasan liberalisasi hubungan ekonomi antar negara merupakan dasar utama dari integrasi ekonomi. Hubungan yang liberal ini sama artinya dengan memperluas pasar domestik masing-masing negara yang terlibat. Perluasan pasar diharapkan akan mendorong ekonomi berskala besar yang meningkatkan efisiensi produksi dan dengan demikian bisa menghasilkan barang dan jasa dengan volume yang lebih besar dengan harga yang lebih murah.

Konsep tentang integrasi ekonomi ini memang sangat menawarkan manfaat yang menjanjikan bagi suatu kawasan dan perekonomian domestik dari masing-masing negara. Studi empiris untuk mengkaji manfaat integrasi ekonomi ASEAN telah banyak dilakukan. Kajian yang menjadi latar belakang percepatan MEA menjadi 2015 menyimpulkan bahwa integrasi ekonomi membawa potensi untuk peningkatan PDB.

¹¹ Mohtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional: disiplin dan metodologi*, Jakarta LP3ES. 1990

Integrasi ekonomi di suatu kawasan akan menghasilkan empat manfaat pokok yaitu:

1. Menstimulir eksistensi dan ekspansi industri manufaktur dengan basis yang lebih rasional
2. Meningkatkan manfaat perdagangan yang bisa diartikan sebagai perbaikan dasar pertukaran perdagangan pada kelompok tersebut.
3. Meningkatkan posisi tawar-menawar terhadap kekuatan ekonomi lain.
4. Menimbulkan persaingan yang semakin intensif sehingga menaikkan tingkat efisiensi.

Integrasi ekonomi dapat bersifat institusional dan fungsional. Bersifat institusional apabila ekonomi dilansir oleh otoritas politik, yaitu yang didasarkan atas suatu kesepakatan formal. Sedangkan yang bersifat fungsional yaitu proses integrasi ekonomi secara alamiah dan terjadi karena peningkatan saling ketergantungan ekonomi. Proses ini digerakkan oleh pertimbangan ekonomi dari pelaku ekonomi yang bersangkutan. Otoritas politik (negara, pemerintah) yang bersangkutan dapat menghambat proses integrasi ekonomi, tetapi dapat semakin mendorong proses integrasi.

F. HIPOTESA

Indonesia menyetujui Integrasi ekonomi ASEAN karena mengingat krisis finansial yang melanda Asia Tenggara membuat Indonesia untuk segera menjalin kerjasama dengan negara-negara di dunia khususnya ASEAN. MEA diyakini dapat

mengurangi pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. Selain itu Indonesia masih berkeyakinan bahwa ASEAN merupakan pangsa pasar yang potensial untuk interaksi perdagangannya. Optimistis Indonesia terlihat dari diratifikasinya ASEAN *Charter*.

G. Metode Penulisan

Kajian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu berusaha memberikan gambaran yang memadai mengenai latar belakang dan mempelajari lebih mendalam dengan menggunakan metode penelitian kualitatif atau studi literature. Data yang diperlukan dengan memanfaatkan sumber data sekunder yang berupa literature, majalah, jurnal, artikel, data-data dari internet serta laporan maupun tulisan-tulisan yang relevan dengan permasalahan ini

H. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian dalam studi ini menekankan pada penggunaan batasan waktu dalam perjalanan ASEAN antara 1997 sampai dengan 2008 tanpa menutup kemungkinan waktu diluar jangkauan penelitian yang masih berkaitan dengan penelitian. Penelitian ini dimulai medio 1997 dimana deklarasi ASEAN *Vision 2020* disepakati.

I. Sistematika Penulisan

BAB I Merupakan bab pendahuluan yang memuat Alasan Pemilihan
Judul, Latar Belakang Masalah, Kerangka Teoritik, Hipotesa,

Metode Penulisan, Tujuan Penulisan, Metode Penelitian, Jangkauan Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II Merupakan bab yang akan berusaha memaparkan perkembangan dan partisipasi negara anggota ASEAN khususnya Indonesia.

BAB III Merupakan bab yang akan berusaha memaparkan hal-hal yang mempengaruhi Integrasi ASEAN 2015.

BAB IV Merupakan bab yang akan memaparkan Tantangan, Hambatan dan Peluang Indonesia dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.

BAB V Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan.

J. Kerangka Penulisan

BAB I PENDAHULUAN, yang meliputi:

- A. Alasan Pemilihan Judul
- B. Tujuan Penulisan
- C. Latar Belakang Masalah
- D. Perumusan Masalah
- E. Kerangka Teori
- F. Hipotesa
- G. Metodologi Penulisan
- H. Jangkauan Penulisan
- I. Sistematika Penulisan

J. Kerangka Penulisan

BAB II PERKEMBANGAN DAN PERJALANAN ASEAN SELAMA 4 DASAWARSA, yang meliputi:

A. Sejarah ASEAN

1. Latar Belakang Terbentuknya ASEAN
2. Struktur Organisasi ASEAN
3. Tujuan dan Prinsip ASEAN
4. Peranan ASEAN
 - a. Mengatasi Masalah Myanmar
 - b. Dunia Internasional

B. Kerjasama ASEAN di Kancah Internasional dalam bidang ekonomi dan perdagangan

1. ASEAN - China
2. ASEAN+3
3. ASEAN - Eropa

BAB III DINAMIKA PERKEMBANGAN INTEGRASI ASEAN 2015

A. *ASEAN Free Trade Area* (AFTA)

1. Perbedaan Integrasi Ekonomi dan Integrasi Keuangan
2. Dasar Pemikiran Terbentuknya AFTA
3. Kelemahan dan Keuntungan Pembentukan AFTA Bagi
Negara-Negara ASEAN

B. Perkembangan Integrasi ASEAN 2015

1. Komunitas Keamanan ASEAN (ASEAN *Security Community/ASC*)
2. Komunitas Ekonomi ASEAN/MEA (ASEAN *Economic Community/AEC*)
3. Komunitas Sosial Budaya ASEAN (ASEAN *Socio-cultural Community/ASCC*)

C. Faktor-Faktor Melatarbelakangi ASEAN Charter

1. Kerangka Hukum
2. Globalisasi
3. Demokrasi dan HAM
4. Sektor Ekonomi
5. Faktor Keamanan

D. Negara Anggota Meratifikasi ASEAN Charter

BAB IV Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015: Tantangan, Hambatan dan Peluang Indonesia, yang meliputi:

A. Masyarakat Ekonomi ASEAN

1. Percepatan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015
2. Keunggulan Produk ASEAN

B. Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia

C. Peluang Indonesia Dalam Pembentukan MEA 2015

D. Tantangan Pembentukan MEA 2015 bagi Indonesia

